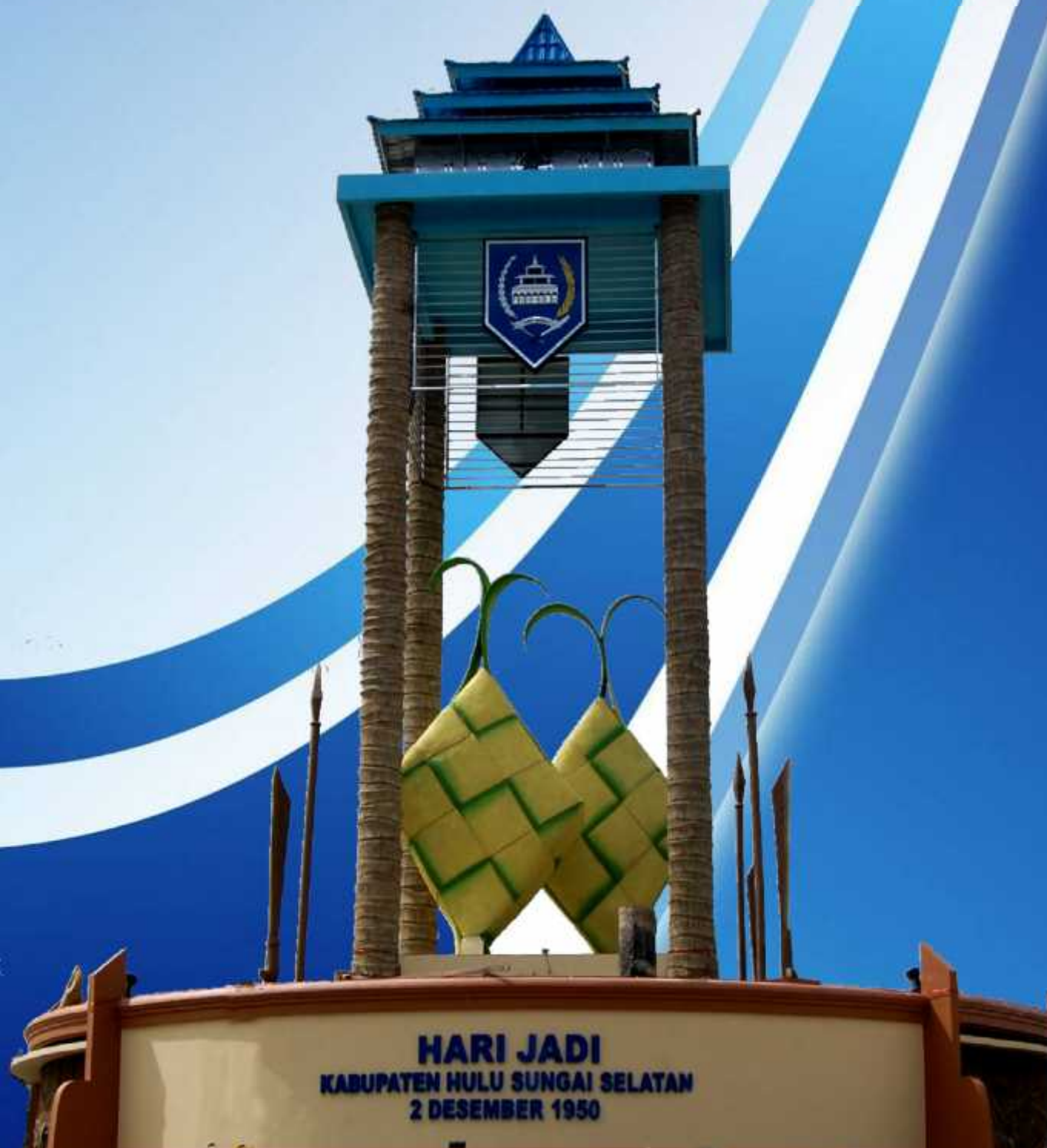


**PERUBAHAN RENJA SKPD
DINAS SOSIAL
TAHUN 2018**



**Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Alamat Jalan Kamboja No. 3 Kandangan 71212, Telpon/Fax (0517) 21123**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	17
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	22
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	23
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	23
3.3 Program dan Kegiatan.....	24
BAB IV PENUTUP	35
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2017 pada Sekretariat.....	6
Tabel 2.2 Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2017 pada Bidang Pemberdayaan Sosial.....	8
Tabel 2.3 Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2017 pada Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	8
Tabel 2.4 Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2017 pada Bidang Perlindungan Sosial.....	9
Tabel 2.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Sosial Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2017	10
Tabel 2.6 Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi.....	17
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2018	25
Tabel 3.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2018.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah dalam kurun waktu 5 tahun (RPJMD), dan rencana pembangunan jangka pendek atau 1 (satu) tahunan (RKPD).

Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah menyiapkan Renja – SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan berpedoman pada Renstra-RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis karena menjadi dokumen yang menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kab. HSS.

Sehubungan dengan adanya perubahan terkait dengan kegiatan dan anggaran pada Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. HSS sehingga dibuatlah Perubahan Rencana Kerja Tahun 2018 yang nantinya akan diusulkan untuk diakomodir pada RKA Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA. 2018.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2018 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan di bidang sosial tahun lalu serta isu-isu strategis yang berkembang.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /

- Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2014-2018;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 60 tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 17. Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Revisi Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

- a. Adanya perubahan terkait dengan kegiatan dan anggaran pada Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. HSS Tahun 2018;
- b. Menterjemahkan secara teknis pelaksanaan Revisi Rencana Strategis Dinas Sosial Kab. HSS;
- c. Menyusun perencanaan pembangunan yang lebih fungsional dan operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- d. Memberikan arah bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang sosial sehingga tujuan, sasaran dan program serta kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai;
- e. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan program dan kegiatan dibidang sosial baik secara internal maupun eksternal;
- f. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana kerja bidang sosial;
- g. Menjadi kerangka acuan bagi dinas dalam upaya meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan upaya kesejahteraan dan pembangunan bidang sosial.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan dari Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

- a. Melaksanakan penyesuaian terhadap perubahan kegiatan dan anggaran Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018;
- b. Menjadikan dasar acuan penyusunan kebijakan Dinas Sosial Kab. HSS;
- c. Menciptakan sinergitas perencanaan, kepastian, keterpaduan, keserasian gerak dalam kegiatan pembangunan yang terencana dan akuntabilitas;
- d. Memberikan pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kab. HSS.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Perubahan Renja ini disusun dalam empat bab, sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan**, berisi latar belakang; landasan hukum; maksud dan tujuan; dan sistematika penulisan.
- BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu**, berisi evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD; analisis kinerja pelayanan SKPD; Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; Review terhadap rancangan awal RKPDP; dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
- BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**, berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD dan Program dan Kegiatan.
- BAB IV Penutup**, berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Renja SKPD Tahun 2017 secara keseluruhan telah terakomodir dalam program dan kegiatan pada APBD Tahun Anggaran 2017. Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun lalu dari 34 kegiatan yang direncanakan terdapat 34 kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2017.

Pada Perubahan Renja Tahun Anggaran 2017 terdapat penambahan 1 (satu) kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya, merupakan kegiatan yang mengakomodir operasional kegiatan dan peningkatan kapasitas kompetensi pendamping PKH, petugas PBI JKN dan petugas SLRT.

Untuk capaian realisasi program dan kegiatan TA. 2017 yang diambil dari Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Sosial Kab. HSS Tahun 2017 Tanggal 31 Desember 2017, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2017
pada SEKRETARIAT

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1.	Belanja Tidak Langsung	3.656.799.000	2.958.657.836	80,91	100
	1. Gaji dan Tunjangan	1.970.074.000	1.699.634.500	86,27	100
	2. Tambahan Penghasilan	1.686.725.000	1.259.023.336	74,64	100
2.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.770.000	1.951.000	70,43	100
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.442.000	59.338.128	56,28	100
	3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	16.250.000	5.584.200	34,36	100
	4. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	11.000.000	11.000.000	100	100
	5. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	15.050.000	15.050.000	100	100

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
	6. Penyediaan Alat Tulis Kantor	47.307.850	47.139.100	99,64	100
	7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.825.360	8.760.560	80,93	100
	8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.409.000	3.409.000	100	100
	9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	176.914.825	171.514.825	96,95	100
	10. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.800.000	3.850.000	80,21	100
	11. Penyediaan Makanan dan Minuman	13.332.000	13.332.000	100	100
	12. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	320.000.000	318.195.753	99,44	100
	13. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya	67.700.000	65.165.000	96,26	100
	14. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	60.000.000	59.230.000	98,72	100
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	1. Pembangunan Gedung Kantor	65.974.000	65.835.000	99,79	100
	2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	35.610.000	35.610.000	100	100
	3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	72.880.000	66.100.000	90,70	100
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
	1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.052.000	6.052.000	100	100
	JUMLAH	4.692.116.035	3.915.774.402	83,45	100

Tabel 2.2
Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2017
Pada BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya				
	1. Kegiatan Pendampingan Usaha Bagi Keluarga Miskin	39.695.000	39.150.000	98,63	100
	2. Kegiatan Penyaluran Pangan bagi Masyarakat Miskin	299.483.080	297.702.280	99,41	100
	3. Kegiatan Koordinasi Program Rumah Sejahtera	243.404.250	239.404.250	98,36	100
2.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				
	1. Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	356.436.000	323.786.000	90,84	100
JUMLAH		939.018.330	900.042.530	95,85	100

Tabel 2.3
Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2017
Pada BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				
	1. Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Miskin dan Terlantar	23.116.000	22.566.000	97,62	100
	2. Penyediaan Bantuan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	187.690.000	182.790.000	97,39	100
2.	Program Pembinaan Anak Terlantar				
	1. Kegiatan Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar	188.788.000	180.128.000	95,41	100
	2. Peningkatan Pelayanan Sosial terhadap Anak	24.410.000	21.405.000	87,69	100

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
3.	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 1. Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	111.292.000	107.230.900	96,35	100
4.	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)				
	1. Pemberdayaan Sosial bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi	81.908.000	76.008.000	92,80	100
	2. Peningkatan Pelayanan Sosial bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial dan Masyarakat Terlantar	111.050.000	73.117.500	65,84	100
JUMLAH		728.254.000	663.245.400,00	91,07	100

Tabel 2.4

**Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2017
Pada BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL**

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1. Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana	114.269.000,00	89.891.000,00	78,67	100
2.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				
	1. Peningkatan Peran Aktif Organisasi dan Relawan Penanggulangan Bencana	547.770.000	544.395.000	99,38	100
	2. Pembinaan, Kepeloporan, Keperintisan dan Kepahlawanan	165.186.000	148.236.000	89,74	100
	3. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	221.400.000	213.275.000	96,31	100
JUMLAH		1.048.665.000	995.797.000	94,96	100

Terdapatnya sisa anggaran tersebut berkenaan dengan adanya penghematan dari proses pengadaan barang dan jasa serta adanya perubahan regulasi dalam memperoleh bantuan sosial.

Capaian Renstra SKPD

Capaian Renstra SKPD Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2017, secara ringkas dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.5

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Sosial Kab. HSS Tahun 2017

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Tahun 2017 %	Realisasi %	Capaian %
1	Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	83,41	77,15	92,49
2	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	52,02	52,02	100
3	Persentase anak terlantar yang terlindungi hak hidup dasarnya	90	100	111
4	Persentase lanjut usia terlantar yang terlindungi hak hidup dasarnya	90	100	111
5	Persentase penyandang disabilitas yang mampu hidup mandiri	6,25	6,25	100
6	Persentase perempuan rawan sosial ekonomi yang meningkat kualitas hidupnya	25	25	100
7	Persentase gelandangan dan pengemis yang mengalami perubahan perilaku	21,27	57,45	270
8	Persentase wanita tuna susila yang mengalami perubahan perilaku	20	20	100
9	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	100	100	100
10	Persentase korban tindak kekerasan yang pulih kondisi psikologisnya	50	0	0
11	Persentase pemenuhan sebagian kebutuhan dasar veteran dan janda veteran	100	100	100
12	Persentase Taman Makam Pahlawan dengan kondisi baik	100	100	100
13	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	83,22	104
14	Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	100	100	100
15	Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	BB	BB	100
16	Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	100	100

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada Renstra Dinas Sosial Kab. HSS umumnya telah memenuhi target yang ditetapkan, namun masih terdapat dua sasaran renstra yang belum tercapai.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang belum mencapai target yaitu :

1. **Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya**, target belum tercapai dikarenakan adanya pengurangan kouta penerima Beras Sejahtera (Rastra) dari Kemensos RI dari target yang telah ditetapkan yaitu dari 15.238 KK menjadi 13.703 KK. Selain itu juga karena ada beberapa penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang tidak memenuhi persyaratan verifikasi dan validasi serta belum mampu menjalankan UEP dengan baik.
2. **Persentase korban tindak kekerasan yang pulih kondisi psikologisnya**, target belum tercapai dikarenakan memang tidak ada laporan kasus tindak kekerasan yang dilaporkan ke Dinas Sosial Kab. HSS.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Sosial Kab. HSS pada tahun 2017 dapat dianalisa dari tingkat pencapaian program dan kegiatan pada masing-masing bidang.

I. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan pada SEKRETARIAT

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, telah berhasil menyediakan keperluan benda pos untuk surat menyurat kantor selama satu tahun.
 - b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik telah berhasil mencapai terbayarnya 12 bulan rekening telepon, air, listrik dan internet kantor.
 - c. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional telah berhasil mencapai terbayarnya pajak dan service 16 buah kendaraan dinas selama satu tahun.
 - d. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja telah berhasil menyediakan pemeliharaan peralatan kantor selama satu tahun.
 - e. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor telah berhasil menyediakan keperluan alat tulis kantor selama satu tahun.
 - f. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan telah berhasil menyediakan barang cetakan dan penggandaan selama satu tahun.
 - g. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor telah berhasil mencapai tersedianya peralatan listrik dan penerangan kantor selama satu tahun.

- h. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor telah berhasil menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor selama satu tahun.
 - i. Kegiatan penyediaan bahan bacaan, telah berhasil mencapai terbayarnya 12 bulan bahan bacaan kantor (surat kabar).
 - j. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman, telah berhasil mencapai terbayarnya 12 bulan makan minum rapat dan tamu.
 - k. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah berhasil mencapai terbayarnya 12 bulan pembayaran SPPD ke luar daerah.
 - l. Kegiatan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya, telah berhasil mencapai terbayarnya 12 bulan jasa non PNS.
 - m. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, telah berhasil mencapai terbayarnya 12 bulan SPPD dalam daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a. Kegiatan pembangunan gedung kantor, telah berhasil dilaksanakan pembangunan selasar gedung kantor pada Dinas Sosial Kab. HSS.
 - b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, telah berhasil dilaksanakan penataan ruang kerja dan pengecatan gedung kantor, pemeliharaan perbaikan toilet gedung II Dinas Sosial Kab. HSS.
 - c. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, telah berhasil dilaksanakan service untuk 5 buah kendaraan dinas/operasional dan penggantian suku cadang untuk 2 buah kendaraan dinas, serta pembayaran BBM dan pelumas untuk kendaraan dinas/operasional yaitu mobil Kepala Dinas, mobil pick up logistik, mobil tangki air, mobil RTU, mobil dapur umum dan speedboat.
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- a. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relisasi SKPD, telah berhasil dilaksanakan penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan selama satu tahun yaitu Revisi Renstra, Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, Prognosis dan Laporan Keuangan.

II. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan pada BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, terdiri dari kegiatan :
 - a. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya, telah berhasil meningkatkan kemampuan petugas dan pendamping sosial sebanyak 86 orang dan memfasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran- Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT).
 - b. Pendampingan usaha bagi keluarga miskin, telah berhasil memberikan fasilitasi bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada 123 KK yang tersebar pada 11 Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan data sebagai berikut :

KECAMATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	TOTAL
KECAMATAN ANGKINANG	4		4
KECAMATAN DAHA BARAT	3		3
KECAMATAN DAHA SELATAN	7		7
KECAMATAN DAHA UTARA	2	4	6
KECAMATAN KALUMPANG	21		21
KECAMATAN KANDANGAN	29	2	31
KECAMATAN LOKSADO	13		13
KECAMATAN PADANG BATUNG	11	1	12
KECAMATAN SIMPUR	5	1	6
KECAMATAN SUNGAI RAYA	11		11
KECAMATAN TELAGA LANGSAT	9		9
JUMLAH	115	8	123

- c. Penyaluran pangan bagi masyarakat miskin, telah berhasil memberikan fasilitasi bantuan beras sejahtera secara gratis kepada keluarga miskin sesuai dengan peruntukannya yang diberikan setiap bulan kepada sebanyak 13.703 KK.
 - d. Koordinasi program rumah sejahtera, telah berhasil memberikan fasilitasi rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 761 buah terdiri dari 463 buah melalui anggaran murni dan 298 buah melalui anggaran perubahan yang tersebar pada 11 Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan data sebagai berikut :

KECAMATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	TOTAL
KECAMATAN ANGKINANG	108	11	119
KECAMATAN DAHA BARAT	-	45	45
KECAMATAN DAHA SELATAN	30	14	44
KECAMATAN DAHA UTARA	15	7	22
KECAMATAN KALUMPANG	-	38	38
KECAMATAN KANDANGAN	-	17	17
KECAMATAN LOKSADO	-	31	31
KECAMATAN PADANG BATUNG	-	80	80
KECAMATAN SIMPUR	-	26	26
KECAMATAN SUNGAI RAYA	63	22	85
KECAMATAN TELAGA LANGSAT	247	7	254
JUMLAH	463	298	761

2. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari kegiatan :
- a. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat, telah berhasil melaksanakan pembinaan 8 jenis Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terdiri dari :
 - Lembaga/organisasi sosial yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) 14 buah, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 1 buah, Koordinator Kesejahteraan Keluarga dan Sosial (K3S) 1 buah, Karang Taruna, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) 5 buah.
 - Relawan sosial yang aktif yaitu Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 11 orang, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial 5 orang.
 - b. Peningkatan kesetiakawanan sosial masyarakat, telah berhasil dilaksanakan peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional yang diisi dengan penyerahan bantuan sosial kepada para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Nasional.

III. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan pada BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL

1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, yang terdiri dari kegiatan :
 - a. Pelayanan sosial bagi lanjut usia miskin dan terlantar, telah berhasil dilaksanakan peringatan Hari Lansia.

- b. Penyediaan bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), telah berhasil memberikan fasilitasi :
- Penyaluran bantuan sosial Bersama Peduli Anak Yatim (BERUPAYA) sebesar Rp.1.200.000,00/orang/tahun kepada sebanyak 648 anak;
 - Penyaluran bantuan sosial Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) sebesar Rp.1.200.000,00/orang/tahun kepada sebanyak 99 anak dari keluarga miskin;
 - Penyaluran bantuan sosial untuk lanjut usia miskin dan terlantar yaitu Jaminan Hidup Lansia (Jadup Lansia) sebesar Rp.2.700.000,00/orang/tahun yang diberikan 2 tahap dalam setahun kepada sebanyak 1.971 orang dan pemberian bantuan sembako untuk lansia sebanyak 200 orang.
 - Pemberian bantuan sembako kepada 160 orang penyandang disabilitas.
2. Program pembinaan anak terlantar, yang terdiri dari kegiatan :
- a. Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar, telah berhasil mengirim 40 orang anak terlantar untuk dibina pada Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Banjarbaru dan pemberian bantuan peralatan modal usaha setelah selesai mengikuti pembinaan bakat dan keterampilan sesuai dengan jurusan yang diikuti terdiri dari : Bahan dan peralatan menjahit, tata rias, service hp, service sepeda motor, kelengkapan/peralatan komputer, kelengkapan/peralatan otomotif, peralatan usaha meubel aluminium.
- b. Peningkatan pelayanan sosial terhadap anak, telah berhasil dilaksanakan peringatan Hari Anak Nasional dan bantuan perlengkapan sekolah kepada 6 orang anak, Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) untuk 12 anak, pendampingan adopsi anak ada 6 kasus dan advokasi ada 8 kasus.
3. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma, terdiri dari kegiatan :
- a. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma, telah berhasil dilaksanakan :
- Pemberian bantuan alat bantu tubuh kepada 7 orang penyandang disabilitas dari keluarga miskin terdiri dari : kursi roda, tongkat ketiak/kruk, kaki palsu/prothese;
 - Pelatihan Praktek Belajar Kerja bagi penyandang disabilitas sebanyak 10 orang dan bantuan barang modal usaha kepada sebanyak 8 orang terdiri dari : bahan dan peralatan menjahit, bahan dan peralatan pijat, bahan dan peralatan service sepeda motor;

- Assesment sebanyak 9 orang penyandang disabilitas dan pengiriman ke panti rehabilitasi penyandang disabilitas sebanyak 2 orang.
4. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya), terdiri dari kegiatan :
- a. Peningkatan pelayanan sosial bagi eks penyandang penyakit sosial dan masyarakat terlantar, telah berhasil dilaksanakan penanganan terhadap masyarakat terlantar dan penyandang penyakit sosial sesuai kasus/masalah sosial yang terjadi sebanyak 22 orang, penertiban gelandangan dan pengemis sebanyak 22 orang.
 - b. Pemberdayaan Sosial bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi, telah berhasil dilakukan :
 - Bimbingan kewirausahaan berupa bimbingan motivasi dan praktek membuat kue kepada perempuan rawan sosial ekonomi sebanyak 20 orang;
 - Seleksi calon siswi Panti Sosial Bina Wanita (PSBW) sebanyak 20 orang;
 - Pembinaan dan pelatihan keterampilan melalui pengiriman ke Panti Sosial Bina Wanita (PSBW) sebanyak 10 orang dan pemberian bantuan peralatan modal usaha kepada 10 orang setelah selesai mengikuti pembinaan keterampilan sesuai dengan jurusan yang diikuti terdiri dari : bahan dan peralatan tata rias, tata boga, tata busana/menjahit.

IV. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan pada BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL

1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, terdiri dari kegiatan :
 - a. Perlindungan sosial bagi korban bencana, telah berhasil dilaksanakan :
 - Penyelenggaraan dapur umum, pemberian bantuan bahan makanan dan peralatan dapur terhadap korban bencana sebanyak 496 jiwa/154 KK dari 38 kejadian bencana yaitu :
 - Kebakaran 27 kejadian, korban 92 jiwa/37 KK;
 - Banjir 6 kejadian, korban 379 jiwa/111 KK;
 - Puting Beliung 2 kejadian, korban 11 jiwa/2 KK;
 - Pohon tumbang 3 kejadian, korban 14 jiwa/4 KK.
 - Penyediaan sarana dan prasarana tanggap darurat bencana seperti sarana mobilitas roda 4 dan roda 2, fasilitas dapur umum, dan fasilitas evakuasi bencana.

2. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari kegiatan :
- a. Pembinaan Kepeloporan, Keperintisan dan Kepahlawanan, telah berhasil dilaksanakan :
 - Pemberian santunan/bantuan sosial berupa tali asih kepada 104 orang veteran dan janda veteran yang diberikan 3 kali dalam setahun yaitu pada peringatan 17 Mei, 17 Agustus dan 10 November;
 - Fasilitasi untuk pemakaman veteran dan fasilitasi ziarah ke Makam tokoh/pahlawan.
 - b. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, telah berhasil dilaksanakan fasilitasi pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, pengecatan, pembangunan Pagar dan Portal Taman Makam Pahlawan Pusara Bhakti Banua.
 - c. Peningkatan peran aktif organisasi dan relawan penanggulangan bencana, telah berhasil dilaksanakan Pemantapan petugas Siaga Bencana dalam hal ini Taruna Siaga Bencana, piket posko kebencanaan di Markas Komando Tagana serta pemberian insentif bagi Taruna Siaga Bencana guna meningkatkan kinerja Taruna Siaga Bencana (Tagana).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, Kajian terhadap Visi Misi Kabupaten dan Kajian terhadap Renstra K/L, maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Isu-isu strategis Dinas Sosial berdasarkan tupoksinya dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6

Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok	Fungsi	Isu Strategis
Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rahabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rahabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan Taman Makam Pahlawan; 2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka kemiskinan di Kab. HSS tahun 2013 sesuai data dari BPS Kalsel adalah sebesar 6,67%. Angka ini masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di Provinsi KalSel tahun 2013 sebesar 4,76 %. Untuk itu kesejahteraan masyarakat Kab. HSS perlu ditingkatkan guna

<p>Taman Makam Pahlawan.</p>	<p>kekerasan, rahabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan Taman Makam Pahlawan;</p> <p>3. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan dibidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rahabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan Taman Makam Pahlawan;</p> <p>4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rahabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan Taman Makam Pahlawan;</p> <p>5. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksanan Teknis Dinas;</p> <p>6. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial.</p>	<p>menurunkan angka kemiskinan;</p> <p>2. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perlu ditingkatkan karena sangat dibutuhkan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial;</p> <p>3. Semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat, maka penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mengamanatkan agar Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan;</p> <p>4. Nilai-nilai kepahlawanan perlu dilestarikan agar pergeseran-pergeseran norma yang terus terjadi dimasyarakat tidak melunturkan rasa patriotisme, semangat juang ,semangat kepahlawanan dan menghargai para pejuang;</p> <p>5. Pelayanan kepada masyarakat di bidang</p>
------------------------------	---	--

		sosial masih perlu lebih ditingkatkan menuju pelayanan prima.
--	--	---

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja antara lain adalah:

- Semakin meningkatnya permasalahan sosial yang ada sementara program dan kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial belum mampu mengatasi seluruh permasalahan yang ada.
- Kurang optimalnya koordinasi dengan instansi vertikal dan horisontal dalam pelaksanaan program/kegiatan.
- Masih terbatasnya data dan informasi, aspek perencanaan serta sumber daya yang tersedia dalam pengelolaan pembangunan bidang sosial.
- Masih terbatasnya peran serta masyarakat dalam pembangunan bidang sosial.

Permasalahan tersebut di atas dapat diberikan solusi dengan upaya-upaya sebagai berikut:

- Penanganan permasalahan sosial dengan menggunakan skala prioritas.
- Meningkatkan sinergisitas program dan kegiatan antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam proses pembangunan.
- Optimalisasi proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi kegiatan serta peningkatan kualitas data dan sumber daya yang ada.
- Melibatkan peran aktif masyarakat, orsos, ormas, pihak swasta dan pihak-pihak yang peduli terhadap pembangunan bidang sosial.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimaksudkan agar masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat terpola pada satu tujuan yang menjadi prioritas pembangunan daerah, terarah, terencana serta berkesinambungan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

RKPD yang ditetapkan merupakan hasil kesepakatan dan sinkronisasi data masukan dari kondisi tertentu dan semua Rencana Kerja SKPD yang memuat kegiatan dan program serta kerangka anggaran SKPD.

Pada Perubahan Renja Tahun 2018 ini, tidak jauh berbeda dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Program dan Kegiatan Renja SKPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan :

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Penyebarluasan informasi tugas pokok dan fungsi SKPD
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Kegiatan penyedian jasa tanaga pendukung administrasi/teknis lainnya
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari kegiatan :

- Pengadaan perlengkapan kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari kegiatan :

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, terdiri dari kegiatan :

- Pendampingan usaha bagi keluarga miskin
- Penyaluran pangan bagi masyarakat miskin
- Koordinasi program rumah sejahtera

-	Pendukung Program Keluarga Harapan (PKH)
5.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, terdiri dari kegiatan :
-	Pelayanan sosial bagi lanjut usia miskin dan terlantar
-	Perlindungan sosial bagi korban bencana
-	Pelayanan sosial bagi anak terlantar
6.	Program Pembinaan Anak Terlantar, terdiri dari kegiatan :
-	Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar.
7.	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, terdiri dari kegiatan :
-	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
8.	Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PKS, narkoba dan penyandang penyakit sosial lainnya, terdiri dari kegiatan :
-	Peningkatan pelayanan sosial bagi eks panyandang penyakit sosial dan masyarakat terlantar
-	Pemberdayaan sosial bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi
9.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari kegiatan :
-	Pembinaan kepeloporan, keperintisan dan kepahlawanan
-	Pembinaan Pembinaan Karang Taruna
-	Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
-	Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
-	Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
-	Pembinaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)
-	Pembinaan Organisasi Sosial / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)
-	Pembinaan Koordinator Kesejahteraan Keluarga dan Sosial Masyarakat
10.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
-	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

Perubahan Renja Dinas Sosial Kab. HSS selain karena adanya perubahan anggaran pada beberapa kegiatan, juga karena adanya penambahan pagu bantuan sosial sebesar Rp.6.000.000.000 (enam milyar rupiah) untuk Program Bantuan Pangan Beras Sejahtera dari Daerah (Bansos Rastra Daerah) kepada 5.016 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

pada program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu kegiatan Penyaluran Pangan bagi Masyarakat Miskin.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui proses sebagai berikut :

1. Musrenbang Tingkat Desa,
2. Musrenbang Tingkat Kecamatan,
3. Musrenbang Tingkat Kabupaten,
4. Musrenbang Tingkat Provinsi,
5. Informasi dari masyarakat, PSM, Orsos, Ormas, serta instansi lain tentang permasalahan sosial yang terjadi.
6. Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan yang ada pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan yang ada pada Kementerian Sosial RI untuk melaksanakan kegiatan dan programnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
8. Mensosialisasikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kepada pihak swasta, masyarakat, PSM, Ormas, Tagana dan Orsos dan pihak-pihak yang peduli terhadap pembangunan sosial.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. HSS merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. HSS berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Sosial Kab. HSS dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. HSS bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Kalimantan Selatan, RPJM Provinsi Kalimantan Selatan, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan; dan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

a. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kab. HSS

Adapun tujuan jangka menengah Dinas Sosial Kab. HSS sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin;
- 2) Meningkatkan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- 3) Meningkatkan perlindungan hak hidup dasar anak dan lanjut usia terlantar;
- 4) Meningkatkan kemandirian hidup penyandang disabilitas;
- 5) Meningkatkan kualitas hidup Perempuan Rawan Sosial Ekonomi;
- 6) Meningkatkan perubahan perilaku PMKS jalanan (Gepeng dan WTS);
- 7) Meningkatkan ketepatan waktu penanganan korban bencana alam;
- 8) Meningkatkan kondisi pulih psikologis korban tindak kekerasan;
- 9) Mewujudkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan;
- 10) Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja.

Sedangkan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kab. HSS sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas hidup keluarga miskin;
- 2) Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- 3) Meningkatnya perlindungan hak hidup dasar anak dan lanjut usia terlantar;
- 4) Meningkatnya kemandirian hidup penyandang disabilitas;
- 5) Meningkatnya kualitas hidup Perempuan Rawan Sosial Ekonomi;
- 6) Meningkatnya perubahan perilaku PMKS jalanan (Gepeng dan WTS);

- 7) Meningkatnya ketepatan waktu penanganan korban bencana alam;
- 8) Meningkatnya kondisi pulih psikologis korban tindak kekerasan;
- 9) Terwujudnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan;
- 10) Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja.

b. Tujuan dan sasaran Renja

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. HSS Tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyesuaian terhadap perubahan terkait dengan kegiatan dan anggaran pada Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. HSS Tahun 2018;
- b. Menjabarkan Revisi Rencana Strategis Dinas Sosial Kab. HSS Tahun 2014-2018 dalam rencana Program/kegiatan Prioritas Dinas Sosial Tahun Anggaran 2018;
- c. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengendalian kinerja Program/Kegiatan Dinas Sosial Kab. HSS Tahun Anggaran 2018;
- d. Menciptakan sinergitas perencanaan, kepastian, keterpaduan dan keserasian gerak dalam kegiatan pembangunan yang terencana dan akuntabilitas;
- e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran Dinas Sosial Kab. HSS.

Sasaran penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. HSS Tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Terakomodirnya usulan perubahan kegiatan dan anggaran pada RKA Perubahan Dinas Sosial Kab. HSS Tahun 2018 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran TA. 2018;
- b. Tercapainya pelaksanaan tugas bagi semua personil untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pembangunan sosial sehingga tujuan, sasaran dan program serta kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai;
- c. Tersedianya kerangka acuan bagi dinas dalam upaya meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan upaya kesejahteraan dan pembangunan bidang sosial;
- d. Tersedianya informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana kerja perubahan Dinas Sosial Kab. HSS;
- e. Terkendalinya kegiatan serta pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan upaya kesejahteraan dan pembangunan bidang sosial secara internal maupun eksternal.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Sosial Kab. HSS Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Perubahan Program Dan Kegiatan Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pmerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Anggaran Tahun 2018							
			Lokasi	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1	Wajib									
1	13	Sosial								
	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
		01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai untuk administrasi kantor	Dinas Sosial	580 lembar	580 lembar	3.070.000	3.070.000	0
		02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran rekening telepon, air, listrik dan internet	Dinas Sosial	15 rekening	15 rekening	93.602.000	93.602.000	0
		06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Mobil operasional laik jalan; Kendaraan operasional laik jalan	Dinas Sosial	5 Unit; 13 Unit	5 Unit; 13 Unit	16.250.000	16.250.000	0
		07	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	Jumlah keikutsertaan dalam kegiatan pawai pembangunan (Mobil Hias) dan pameran pembangunan (Kandang Expo)	Dinas Sosial	2 kegiatan	2 kegiatan	11.000.000	11.000.000	0
		09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang dipelihara	Dinas Sosial	43 unit	43 unit	15.050.000	15.050.000	0

			10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Dinas Sosial	45 jenis	45 jenis	49.295.500	49.295.500	0
			11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan dokumen yang disediakan	Dinas Sosial	5 jenis	5 jenis	11.103.210	11.103.210	0
			12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Dinas Sosial	8 jenis	8 jenis	3.409.000	3.409.000	0
			13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Dinas Sosial	22 jenis	22 jenis	56.160.000	56.160.000	0
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah bahan bacaan kantor yang disediakan	Dinas Sosial	48 eksemplar	48 eksemplar	4.800.000	4.800.000	0
			17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum untuk kegiatan kantor yang disediakan	Dinas Sosial	11 bulan	11 bulan	17.540.000	17.540.000	0
			18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pembayaran SPPD ke luar daerah yang disediakan	Dinas Sosial	1 tahun	1 tahun	313.000.000	313.000.000	0
			19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya	Jumlah pembayaran honorarium Non PNS	Dinas Sosial	8 orang	8 orang	81.850.000	81.850.000	0

		20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah pembayaran SPPD dalam daerah yang disediakan	Dinas Sosial	1 tahun	1 tahun	54.000.000	54.000.000	0
	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
		07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah tempat parkir yang dibangun dengan kondisi baik; Jumlah aksesoris taman dalam ruangan yang dibuat	Dinas Sosial	1 paket; 2 paket		86.360.000	119.109.000	32.749.000
				Jumlah alat listrik yang dibeli			1 Paket			
		22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor dengan kondisi baik; Jumlah Taman Makam Pahlawan dengan kondisi baik	Dinas Sosial	2 buah; 1 lokasi	2 buah; 1 lokasi	122.000.000	122.000.000	0
		24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Mobil operasional laik jalan 5 unit; kendaraan operasional laik jalan 13 unit	Dinas Sosial	5 Unit; 13 Unit	5 Unit; 13 Unit	82.400.000	82.400.000	0
	06		Peningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							0
		01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan	Laporan AKIP diselesaikan tepat	Dinas Sosial	1 Laporan; 1 Laporan;	1 Laporan; 1 Laporan;	5.059.920	5.059.920	0

				ikhtisar kinerja SKPD.	waktu 1 Laporan; Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diselesaikan tepat waktu 1 Laporan; Laporan Keuangan diselesaikan tepat waktu 14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan			
1	13	15		Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya							
			03	Pendampingan usaha bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan usaha ekonomis produktif (UEP); Jumlah KK dalam eks Komunitas Adat Terpencil yang mendapat bantuan UEP	Kab. HSS	130 KK; 10 KK	130 KK; 10 KK	56.362.880	56.362.880	0
			08	Penyaluran Pangan Bagi Masyarakat Miskin	Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) yang	Kab. HSS	15.238 RTS-PM	15.238 RTS-PM	279.134.900	6.279.134.900	6.000.000.000

					mendapatkan bantuan beras sejahtera (Rastra)						
					Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan beras sejahtera dari Daerah			5.016 KPM			
			11	Penyediaan Program Rumah Sejahtera	Jumlah rumah keluarga miskin tidak layak huni yang direhabilitasi	Kab. HSS	425 buah	425 buah	153.106.000	153.106.000	0
			12	Pendukung Program Keluarga Harapan (PKH)	Persentase penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kab. HSS	Kab. HSS	100 %	100 %	749.094.200	675.894.200	(73.200.000)
1	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial							
			01	Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Miskin dan Terlantar	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan pemenuhan sebagian kebutuhan hak hidup dasar lanjut usia terlantar sesuai dengan standar	Kab. HSS	2.794 orang	2.794 orang	115.622.880	123.203.880	7.581.000


			14	Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan tanggap darurat korban bencana; Jumlah relawan penanggulangan bencana (TAGANA) yang berperan aktif dalam penanggulangan bencana	Kab. HSS	100 %; 76 orang	100 %; 76 orang	477.936.880	480.146.880	2.210.000
			15	Pelayanan Sosial bagi Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan pemenuhan sebagian kebutuhan hak hidup dasar anak sesuai dengan standar	Kab. HSS	1.117 orang	1.117 orang	82.505.760	67.160.760	(15.345.000)
		17		Pembinaan Anak Terlantar							
			04	Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar.	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan pemenuhan sebagian kebutuhan hak hidup dasar anak sesuai dengan standar	Kab. HSS	1.117 orang	1.117 orang	122.260.000	183.360.000	61.100.000
1	13	18		Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma							

		04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma.	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar penyandang disabilitas sesuai dengan standar	Kab. HSS	196 orang	196 orang	154.853.440	154.853.440	0
	20		Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PKS, narkoba dan penyandang penyakit sosial lainnya							
		06	Peningkatan Pelayanan Sosial bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial dan Masyarakat Terlantar.	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial sesuai dengan standar 25 Orang; Jumlah wanita tuna susila yang mendapatkan pelayanan sosial sesuai dengan standar 5 Orang; Persentase penyandang penyakit sosial lainnya dan masyarakat terlantar yang mendapat	Kab. HSS	25 Orang; 5 Orang; 70 %	25 Orang; 5 Orang; 70 %	111.050.000	111.050.000	0

					pelayanan sosial sesuai dengan standar						
			07	Pemberdayaan Sosial bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Jumlah PRSE yang mendapatkan pelayanan sosial sesuai dengan standar	Kab. HSS	60 orang	74 orang	69.992.640	113.092.640	43.100.000
1	13	21		Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial							
			05	Pembinaan kepeloporan, keperintisan dan kepahlawanan.	Jumlah veteran dan janda veteran yang menerima santunan/bantuan sosial	Kab. HSS	104 orang	104 orang	184.162.000	181.662.000	(2.500.000)
			10	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah organisasi sosial yang aktif	Kab. HSS	25 organisasi	25 organisasi	139.663.520	139.663.520	0
			11	Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang aktif	Kab. HSS	11 orang	11 orang	148.004.000	161.384.000	13.380.000
			12	Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang aktif	Kab. HSS	25 orang	25 orang	190.926.000	183.651.000	(7.275.000)
			13	Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah lembaga sosial yang aktif (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga/LK3)	Kab. HSS	1 lembaga	1 lembaga	23.132.080	23.132.080	0
			14	Pembinaan Wahana Kesejahteraan Sosial	Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial	Kab. HSS	5 buah	5 buah	3.100.000	3.100.000	0

				Berbasis Masyarakat (WKSBM)	Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang aktif						
			15	Pembinaan Organisasi Sosial / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Jumlah lembaga sosial yang aktif (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA)	Kab. HSS	14 lembaga	14 lembaga	18.910.000	18.910.000	0
			16	Pembinaan Koordinator Kesejahteraan Keluarga dan Sosial Masyarakat	Jumlah lembaga sosial yang aktif (Koordinator Kesejahteraan Keluarga dan Sosial Masyarakat)	Kab. HSS	1 lembaga	1 lembaga	6.800.000	6.800.000	0
1	7	26		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan							
			01	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Jumlah Sarjana Pendamping Desa Sejahtera yang aktif	Kab. HSS	148 orang	148 orang	4.342.640.000	4.280.840.000	(61.800.000)
JUMLAH TOTAL ANGGARAN									8.455.206.810	14.455.206.810	6.000.000.000

Keterangan :

 Kegiatan yang mengalami perubahan anggaran

 Indikator dan target perubahan

Tabel 3.2
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas hidup keluarga miskin	Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	85,81%
2	Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	79,39%
3	Meningkatnya perlindungan hak hidup dasar anak dan lanjut usia terlantar	Persentase anak terlantar yang terlindungi hak hidup dasarnya	90%
		Persentase lanjut usia terlantar yang terlindungi hak hidup dasarnya	90%
4	Meningkatnya kemandirian hidup penyandang disabilitas	Persentase penyandang disabilitas yang mampu hidup mandiri	10%
5	Meningkatnya kualitas hidup Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	Persentase perempuan rawan sosial ekonomi yang meningkat kualitas hidupnya	40%
6	Meningkatnya perubahan perilaku PMKS jalanan (Gepeng dan WTS)	Persentase gelandangan dan pengemis yang mengalami perubahan perilaku	21,27%
		Persentase wanita tuna susila yang mengalami perubahan perilaku	20%
7	Meningkatnya ketepatan waktu penanganan korban bencana alam	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	100%
8	Meningkatnya kondisi pulih psikologis korban tindak kekerasan	Persentase korban tindak kekerasan yang pulih kondisi psikologisnya	50%
9	Terwujudnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan	Persentase pemenuhan sebagian kebutuhan dasar veteran dan janda veteran	100%
		Persentase Taman Makam Pahlawan dengan kondisi baik	100%
10	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81
		Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	100%
		Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	A
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%

BAB IV PENUTUP

Secara spesifik Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 merupakan kelanjutan yang ditopang dengan Renja terdahulu untuk mengakomodir perubahan terkait kegiatan dan anggaran Renja Dinas Sosial Tahun 2018.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. HSS ini berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi SKPD. Selanjutnya Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD.

Rencana Kerja Tahun 2018 ini disusun untuk menterjemahkan secara teknis pelaksanaan RPJP dan RPJMD Kab. HSS. Untuk itu diperlukan penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Renja. Apabila ada masukan dan kritik yang sifatnya konstruktif akan diterjemahkan dalam program-program yang diusulkan. Hal ini untuk mendorong proses penyusunan program yang transparan, dan munculnya kesadaran untuk mengawasi proses penyusunan serta implementasi program dari masyarakat.

Dalam rangka pencapaian sasaran program dan kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran”, selanjutnya mengisyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada Dinas Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap menerapkan prinsi-prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Keberhasilan Rencana Kerja ini memerlukan dukungan dan kerja keras semua pihak baik lintas SKPD, legislatif dan masyarakat. Akhirnya, semoga Renja ini dapat menjadi bahan penyusunan program-program pembangunan daerah dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kandangan, Juni 2018

Kepala Dinas Sosial Kab. HSS,



Hj. SITI ERMA, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19670328 198611 2 001

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2018
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Nama SKPD : Dinas Sosial

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2019		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																						
					730.129.710	730.129.710																
1	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1.06 . 1.06.01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai untuk administrasi kantor	Jumlah materai untuk administrasi kantor	-	Surat menyurat	SKPD	SKPD	580 Lembar	580 Lembar	3.070.000	3.070.000		-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Lembar	-	berjalan	0
		Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	1.06 . 1.06.01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran rekening telepon, air, listrik dan internet kantor	Jumlah pembayaran rekening telepon, air, listrik dan internet kantor	-	Rekening telepon, air, listrik dan internet	SKPD	SKPD	15 Rekening	15 Rekening	93.602.000	93.602.000		-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Rekening	-	berjalan	0
		Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	1.06 . 1.06.01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pembayaran pajak STNK kendaraan dinas/operasional	Kendaraan operasional laik jalan; Mobil operasional laik jalan	-	Kendaraan dinas/operasional	SKPD	SKPD	13 Unit;5 Unit	13 Unit;5 Unit	16.250.000	16.250.000		-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Unit;0 Unit	-	berjalan	0
		Persentase temuan BPK/inspektorat yang ditindaklanjuti	1.06 . 1.06.01 . 07	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah keikutsertaan dalam kegiatan pawai pembangunan (Mobil Hias) dan pameran pembangunan (Kandangan Expo)	Jumlah keikutsertaan dalam kegiatan pawai pembangunan (Mobil Hias) dan pameran pembangunan (Kandangan Expo)	-	Informasi tugas pokok dan fungsi SKPD	SKPD	SKPD	2 Kegiatan	2 Kegiatan	11.000.000	11.000.000		-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Kegiatan	-	berjalan	0
			1.06 . 1.06.01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang dipelihara	Jumlah peralatan kerja kantor yang dipelihara	-	Peralatan kerja	SKPD	SKPD	43 Unit	43 Unit	15.050.000	15.050.000		-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Unit	-	baru	0
			1.06 . 1.06.01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	-	Alat tulis Kantor	SKPD	SKPD	45 Jenis	45 Jenis	49.295.500	49.295.500		-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Jenis	-	berjalan	0
			1.06 . 1.06.01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan dokumen yang disediakan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan dokumen yang disediakan	-	Barang cetakan dan penggandaan	SKPD	SKPD	5 Jenis	5 Jenis	11.103.210	11.103.210		-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Jenis	-	berjalan	0
			1.06 . 1.06.01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	-	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	SKPD	8 Jenis	8 Jenis	3.409.000	3.409.000		-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Jenis	-	berjalan	0
			1.06 . 1.06.01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	Peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	SKPD	22 Jenis	22 Jenis	56.160.000	56.160.000		-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Jenis	-	berjalan	0
			1.06 . 1.06.01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan kantor yang disediakan	Jumlah bahan bacaan kantor yang disediakan	-	Bahan bacaan	SKPD	SKPD	48 Eksemplar Surat Kabar Harian	48 Eksemplar Surat Kabar Harian	4.800.000	4.800.000		-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Eksemplar Surat Kabar Harian	-	berjalan	0
			1.06 . 1.06.01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum untuk kegiatan kantor yang disediakan	Jumlah makan minum untuk kegiatan kantor yang disediakan	-	Makanan dan minuman kegiatan kantor	SKPD	SKPD	11 Bulan	11 Bulan	17.540.000	17.540.000		-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Bulan	-	berjalan	0

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2019		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
							Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			20	21
			1.06 . 1.06.01 . 01 . 18	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pembayaran SPPD ke luar daerah yang disediakan	Jumlah pembayaran SPPD ke luar daerah yang disediakan	-	SPPD luar daerah	SKPD	SKPD	1 Tahun	1 Tahun	313.000.000	313.000.000	-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Tahun	-	berjalan	0	
			1.06 . 1.06.01 . 01 . 19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya	Jumlah pembayaran honorarium Non PNS	Jumlah pembayaran honorarium Non PNS	-	Petugas kebersihan Taman Makam Pahlawan, sopir, penjaga malam, instruktur senam dan penceramah tausiyah	SKPD	SKPD	8 Orang	8 Orang	81.850.000	81.850.000	-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Orang	-	berjalan	0	
			1.06 . 1.06.01 . 01 . 20	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah pembayaran SPPD dalam daerah yang disediakan	Jumlah pembayaran SPPD dalam daerah yang disediakan	-	SPPD dalam daerah	SKPD	SKPD	1 Tahun	1 Tahun	54.000.000	54.000.000	-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Tahun	-	berjalan	0	
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur													290.760.000	323.509.000	32.749.000							
			1.06 . 1.06.01 . 02 . 07	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Jumlah tempat parkir yang dibangun dengan kondisi baik; Jumlah aksesoris taman dalam ruangan yang dibuat	Jumlah alat listrik yang dibeli; Jumlah tempat parkir yang dibangun dengan kondisi baik; Jumlah aksesoris taman dalam ruangan yang dibuat	-	Tempat parkir, Taman dalam ruangan dan Alat Listrik	SKPD	SKPD	1 Paket;2 Paket	1 Paket;1 Paket;2 Paket	86.360.000	119.109.000	32.749.000	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Paket;0 Paket;0 Paket	-	baru		
2	Terwujudnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan	Persentase Taman Makam Pahlawan dengan kondisi baik	1.06 . 1.06.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Taman Makam Pahlawan dengan kondisi baik; Gedung kantor dengan kondisi baik	Jumlah Taman Makam Pahlawan dengan kondisi baik; Gedung kantor dengan kondisi baik	-	Gedung kantor dan Taman Makam Pahlawan	SKPD	SKPD	1 Lokasi;2 Buah	1 Lokasi;2 Buah	122.000.000	122.000.000	-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Lokasi;0 Buah	-	berjalan	0	
			1.06 . 1.06.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Mobil operasional laik jalan; Kendaraaan operasional laik jalan	Mobil operasional laik jalan; Kendaraaan operasional laik jalan	-	Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	SKPD	5 Unit;13 Unit	5 Unit;13 Unit	82.400.000	82.400.000	-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Unit;0 Unit	-	berjalan	0	
7 Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan													5.059.920	5.059.920	-							
			1.06 . 1.06.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan AKIP diselesaikan tepat waktu; Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diselesaikan tepat waktu; Laporan Keuangan diselesaikan tepat waktu	Laporan AKIP diselesaikan tepat waktu; Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diselesaikan tepat waktu; Laporan Keuangan diselesaikan tepat waktu	-	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD	SKPD	1 Laporan; 1 Laporan; 14 Laporan	1 Laporan; 1 Laporan; 14 Laporan	5.059.920	5.059.920	-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Jenis	-	berjalan	0	
Sosial																						
2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial													676.065.520	670.511.520	(5.554.000)							

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2019		Jenis Kegiatan	SKPD	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c	Penanggung jawab
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3	Meningkatnya perlindungan hak hidup dasar anak dan lanjut usia terlantar	Persentase lanjut usia terlantar yang terlindungi hak hidup dasarnya	1.06 . 1.06.01 . 16 .01	Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Miskin dan Terlantar	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan pemenuhan sebagian kebutuhan hak hidup dasar lanjut usia terlantar sesuai dengan standar	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan pemenuhan sebagian kebutuhan hak hidup dasar lanjut usia terlantar sesuai dengan standar	-	Lanjut Usia Miskin dan Terlantar	Kabupaten	Kabupaten	2.794 Orang	2.794 Orang	115.622.880	123.203.880	7.581.000	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Orang	-	alternatif	0
4	Meningkatnya ketepatan waktu penanganan korban bencana alam	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	1.06 . 1.06.01 . 16 .14	Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan tanggap darurat korban bencana; Jumlah relawan penanggulangan bencana (TAGANA) yang berperan aktif dalam penanggulangan bencana	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan tanggap darurat korban bencana; Jumlah relawan penanggulangan bencana (TAGANA) yang berperan aktif dalam penanggulangan bencana	-	Korban Bencana Alam	Kabupaten	Kabupaten	100 %;76 Orang	100 %;76 Orang	477.936.880	480.146.880	2.210.000	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0%;0 Orang	-	alternatif	0
	Meningkatnya perlindungan hak hidup dasar anak dan lanjut usia terlantar	Persentase anak terlantar yang terlindungi hak hidup dasarnya	1.06 . 1.06.01 . 16 .15	Pelayanan sosial bagi anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang menerima bantuan sosial	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan pemenuhan sebagian kebutuhan hak hidup dasar anak sesuai dengan standar	-	Anak Terlantar	Kabupaten	Kabupaten	1.117 Orang	1.117 Orang	82.505.760	67.160.760	(15.345.000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Orang	-	alternatif	0
15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya													1.237.697.980	7.164.497.980	5.926.800.000						
5	Meningkatnya kualitas hidup keluarga miskin	Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	1.06 . 1.06.01 . 15 .03	Pendampingan Usaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah KK dalam eks Komunitas Adat Terpencil yang memperoleh bantuan usaha ekonomis produktif (UEP); Jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan usaha ekonomis produktif (UEP)	Jumlah KK dalam eks Komunitas Adat Terpencil yang memperoleh bantuan usaha ekonomis produktif (UEP); Jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan usaha ekonomis produktif (UEP)	-	Keluarga Miskin	Kabupaten	Kabupaten	10 KK;130 KK	10 KK;130 KK	56.362.880	56.362.880	-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 KK;0 KK	-	berjalan	0
			1.06 . 1.06.01 . 15 .08	Penyaluran Pangan bagi Masyarakat Miskin	Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) yang mendapatkan bantuan beras sejahtera (Rastra)	Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) yang mendapatkan bantuan beras sejahtera (Rastra); Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan beras sejahtera dari daerah	-	Keluarga Miskin	Kabupaten	Kabupaten	15.238 RTS-PM	15.238 RTS-PM; 5.016 KPM	279.134.900	6.279.134.900	6.000.000.000	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 KPM	-	alternatif	0
			1.06 . 1.06.01 . 15 .11	Penyediaan Program Rumah Sejahtera	Jumlah rumah keluarga miskin tidak layak huni yang direhabilitasi	Jumlah rumah keluarga miskin tidak layak huni yang direhabilitasi	-	Keluarga Miskin	Kabupaten	Kabupaten	425 Buah	425 Buah	153.106.000	153.106.000	-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Buah	-	berjalan	0

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2019		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab				
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif			
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
			1.06 . 1.06.01 . 15 . 12	Pendukung Program Keluarga Harapan (PKH)	Persentase penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kab. HSS	Persentase penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kab. HSS	-	Keluarga Miskin	Kabupaten	Kabupaten	100%	100%	749.094.200	675.894.200	(73.200.000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0%	-	alternatif	0			
17 Program pembinaan anak terlantar													122.260.000	183.360.000	61.100.000									
	Meningkatnya perlindungan hak hidup dasar anak dan lanjut usia terlantar	Persentase anak terlantar yang terlindungi hak hidup dasarnya	1.06 . 1.06.01 . 17 . 04	Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan pemenuhan hak hidup dasar anak sesuai dengan standar	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan pemenuhan sebagian kebutuhan hak hidup dasar anak sesuai dengan standar	-	Anak Terlantar	Kabupaten	Kabupaten	1.117 Orang	1.117 Orang	122.260.000	183.360.000	61.100.000	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Orang	-	alternatif	0			
18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma													154.853.440	154.853.440	-									
6	Meningkatnya kemandirian hidup penyandang disabilitas	Persentase penyandang disabilitas yang mampu hidup mandiri	1.06 . 1.06.01 . 18 . 04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar penyandang disabilitas sesuai dengan standar	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar penyandang disabilitas sesuai dengan standar	-	Penyandang Disabilitas	Kabupaten	Kabupaten	196 Orang	196 Orang	154.853.440	154.853.440	-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Orang	-	berjalan	0			
20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)													181.042.640	224.142.640	43.100.000									
7	Meningkatnya perubahan perilaku PMKS jalanan (Gepeng dan WTS)	Persentase gelandangan dan pengemis yang mengalami perubahan perilaku; Persentase wanita tuna susila yang mengalami perubahan perilaku	1.06 . 1.06.01 . 20 . 06	Peningkatan Pelayanan Sosial bagi eks. Penyandang Penyakit Sosial dan Masyarakat Terlantar	Jumlah wanita tuna susila yang mendapatkan pelayanan sosial; Persentase penyandang penyakit sosial lainnya dan masyarakat terlantar yang mendapat pelayanan sosial sesuai dengan standar; Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial	Jumlah wanita tuna susila yang mendapatkan pelayanan sosial; Persentase penyandang penyakit sosial lainnya dan masyarakat terlantar yang mendapat pelayanan sosial sesuai dengan standar; Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial	-	Gelandangan, pengemis, tuna susila, eks penyandang penyakit sosial dan masyarakat terlantar	Kabupaten	Kabupaten	5 Orang;70 %;25 Orang	5 Orang;70 %;25 Orang	111.050.000	111.050.000	-	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Orang;0 %;0 Orang	-	berjalan	0			
8	Meningkatnya kualitas hidup Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	Persentase perempuan rawan sosial ekonomi yang meningkat kualitas hidupnya	1.06 . 1.06.01 . 20 . 07	Pemberdayaan Sosial bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang mendapatkan pelayanan sosial sesuai dengan standar	Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang mendapatkan pelayanan sosial sesuai dengan standar	-	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Kabupaten	Kabupaten	60 Orang	74 Orang	69.992.640	113.092.640	43.100.000	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Orang	-	alternatif	0			
21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial													714.697.600	718.302.600	3.605.000									
	Terwujudnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan	Persentase pemenuhan sebagian kebutuhan dasar veteran dan janda veteran	1.06 . 1.06.01 . 21 . 05	Pembinaan Kepeloporan, Keperintisan dan Kepahlawanan	Jumlah veteran dan janda veteran yang menerima santunan/bantuan sosial	Jumlah veteran dan janda veteran yang menerima santunan/bantuan sosial	-	Veteran dan janda veteran	Kabupaten	Kabupaten	104 Orang	104 Orang	184.162.000	181.662.000	(2.500.000)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	0 Orang	-	alternatif	0			

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2018 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2019		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab			
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		a/b/c		
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
9	Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	1.06 . 1.06.01 . 21 .10	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah Karang Taruna yang dibina	Jumlah organisasi sosial yang aktif	-	Karang Taruna	Kabupaten	Kabupaten	25 Organisasi	25 Organisasi	139.663.520	139.663.520	-	-	Pendapatan Daerah	0 Organisasi	-	berjalan	0		
			1.06 . 1.06.01 . 21 .11	Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang dibina	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang aktif	-	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Kabupaten	Kabupaten	11 Orang	11 Orang	148.004.000	161.384.000	13.380.000	-	-	Pendapatan Daerah	0 Orang	-	alternatif	0	
			1.06 . 1.06.01 . 21 .12	Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang dibina	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang aktif	-	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Kabupaten	Kabupaten	25 Orang	25 Orang	190.926.000	183.651.000	(7.275.000)	-	-	Pendapatan Daerah	0 Orang	-	alternatif	0	
			1.06 . 1.06.01 . 21 .13	Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah lembaga sosial yang aktif (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga/LK3)	Jumlah lembaga sosial yang aktif (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga/LK3)	-	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kabupaten	Kabupaten	1 Lembaga	1 Lembaga	23.132.080	23.132.080	-	-	-	Pendapatan Daerah	0 Lembaga	-	berjalan	0	
			1.06 . 1.06.01 . 21 .14	Pembinaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang aktif	Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang aktif	-	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	Kabupaten	Kabupaten	5 Buah	5 Buah	3.100.000	3.100.000	-	-	-	Pendapatan Daerah	0 Buah	-	berjalan	0	
			1.06 . 1.06.01 . 21 .15	Pembinaan Organisasi Sosial / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Jumlah lembaga sosial yang aktif (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA)	Jumlah lembaga sosial yang aktif (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA)	-	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Kabupaten	Kabupaten	14 Organisasi	14 Organisasi	18.910.000	18.910.000	-	-	-	Pendapatan Daerah	0 Organisasi	-	berjalan	0	
			1.06 . 1.06.01 . 21 .16	Pembinaan Koordinator Kesejahteraan Keluarga dan Sosial	Jumlah lembaga sosial yang aktif (Koordinator Kesejahteraan Keluarga dan Sosial Masyarakat)	Jumlah lembaga sosial yang aktif (Koordinator Kesejahteraan Keluarga dan Sosial Masyarakat)	-	Koordinator Kesejahteraan Keluarga dan Sosial Masyarakat	Kabupaten	Kabupaten	1 Lembaga	1 Lembaga	6.800.000	6.800.000	-	-	-	Pendapatan Daerah	0 Lembaga	-	berjalan	0	
			28 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan										4.342.640.000	4.280.840.000	(61.800.000)								
	Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	1.06 . 1.06.01 . 18 .04	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Jumlah Sarjana Pendamping Desa Sejahtera yang aktif	Jumlah Sarjana Pendamping Desa Sejahtera yang aktif	-	Sarjana Pendamping Desa Sejahtera	Kabupaten	Kabupaten	148 Orang	148 Orang	4.342.640.000	4.280.840.000	(61.800.000)	-	Pendapatan Daerah	0 Orang	-	baru			
JUMLAH													8.455.206.810	14.455.206.810	6.000.000.000								

Kandangan, Juni 2018

Kepala Dinas Sosial Kab. HSS,



Hi. SITI ERMA, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19670328 198611 2 001